

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA SEMARANG



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ARDANA INDRA PERMANA

C2B008005

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ardana Indra Permana

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008005

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI
PASAR DI KOTA SEMARANG**

Dosen Pembimbing : Dra.Herniwati Retno Handayani,M.S.

Semarang, 21 November 2013

Dosen Pembimbing,

(Dra.Herniwati Retno Handayani,M.S.)

NIP. 19551128 198103 2004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ardana Indra Permana
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI
PASAR DI KOTA SEMARANG**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 November 2013

Tim Penguji :

1. Dra. Herniwati RH, M.S. (.....)
2. Firmansyah S.E., M.Si. (.....)
3. Arif Pujiono S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ardana Indra Permana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 November 2013

Yang membuat pernyataan,

Ardana Indra Permana

NIM : C2B08005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Rasa syukur penulis panjatkan kehadiran-Nya karena sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk terus belajar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang”. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya yang tak terkira
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. Dra. Herniwati Retno Handayani ,M.S. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Nenek Woyanti, S.E., M.Si., selaku dosen wali jurusan IESP angkatan 2008.
6. Seluruh Dosen, Staf pengajar, Staf kemahasiswaan, TU, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan Fakultas Ekonomika UNDIP, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Pegawai Dinas Pasar Kota Semarang atas keramahan serta bantuannya dalam mencari ketersediaan data untuk kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang atas kemudahannya dalam ketersediaan data bagi penulis untuk kelengkapan skripsi ini.
9. Bapak Mohammad Latief dan Ibu Etty Hendrawati yang tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Serta Dandy Permana Indramawan, semoga penulis dapat dijadikan panutan dan inspirasi.
10. Fanita Osha Tazkia, untuk segala bantuan, semangat dan motivasi dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan IESP 2008, Cahyo, Rosetyadi, Azhar, Haryo, Teddy, Tresna, Ditho, Effendi, Anas, Rian, Mahocca, Anang, Eggy serta teman-teman seangkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan menjadi bekal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 21 November 2013

Penulis

Ardana Indra Permana

ABSTRAK

Retribusi Pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang potensial di Kota Semarang. Jumlah penerimaan retribusi pasar yang semakin tinggi dari tahun ke tahun memiliki potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi pada tahun 2008-2010 realisasi penerimaan retribusi pasar tidak pernah bisa memenuhi targetnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi pasar di Kota Semarang pada tahun 2002-2010. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB perkapita dan laju inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder per-triwulan dari tahun 2002-2010. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan PDRB perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif terhadap penerimaan retribusi pasar. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, semakin banyak orang yang berkunjung ke pasar akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar. PDRB perkapita memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar, bila PDRB perkapita tinggi maka kemampuan masyarakat untuk berbelanja akan lebih tinggi karena kebutuhan untuk berbelanja bisa terpenuhi. Laju inflasi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan penerimaan retribusi pasar. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel jumlah penduduk, PDRB perkapita dan laju inflasi secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi pasar. Nilai R^2 sebesar 0,950 yang berarti sebesar 95% variasi penerimaan retribusi pasar dapat dijelaskan dari variasi ketiga variabel bebas sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Kata kunci: *retribusi pasar, PDRB perkapita, jumlah penduduk, laju inflasi, regresi linier berganda.*

ABSTRACT

Markets retribution is one of the potential retribution in the city of Semarang. The increased income of market retribution from year to year has the potential to be developed. However, during the year 2008-2010 market tax receipts were never able to meet its target.

This study aims to analyze market retribution receipts in the city of Semarang in the year 2002-2010. The variables used in this study is the total population, GDP percapita and the rate of inflation. The data used in this study is a secondary data per quarter from 2002-2010. Methods of data collection and documentation methods were analyzed using multiple linear regression analysis.

The results showed that the variables of population and GDP percapita has a significant influence on the market retribution. Both of these variables have a positive relationship to market retribution. The population greatly affect the market retribution, the more people who visit the market will increase market acceptance of retribution GDP percapita have the positive relationship and significant to market acceptance of retribution, when GDP percapita is high then the ability of people to shop will be higher because of the need to shop can be met. The inflation rate has a negative and insignificant relationship with the market acceptance of retribution. F test results indicate that the variable overall population, GDP percapita and inflation rate together to show its affect on market acceptance of retribution. R^2 value of 0,950, which menas a 95% market retribution receipts variation can be explained from the third variation of the independent variable while the rest is explained by other causes outside the model.

Keywords: market retribution, population, GDP percapita, inflation rate, multiple linear regression,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	.iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian	17
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	19
2.1.1 Tinjauan Umum Keuangan Negara.....	19
2.1.2 Otonomi Daerah	20
2.1.3 Keuangan Daerah	22
2.1.4 Kriteria Sumber Penerimaan Daerah	25
2.1.5 Sumber Penerimaan Daerah.....	28
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	29
2.1.7 Retribusi Daerah.....	30
2.1.8 Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	31
2.1.9 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	32
2.1.10 Fungsi Retribusi Daerah.....	33
2.1.11 Syarat Pemungutan Retribusi Daerah	33
2.1.12 Faktor Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah	34
2.1.13 Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Daerah	36
2.1.14 Retribusi Pemerintah Daerah	39
2.1.15 Klasifikasi Retribusi Daerah	40
2.1.16 Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi	44
2.1.17 Retribusi Pasar	45
2.1.18 Inflasi.....	46

4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda	78
4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	78
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	79
4.2.4.1 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama.....	79
4.2.4.2 Koefisien Regresi Parsial	79
4.2.5 Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	81
4.2.6 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Retribusi Pasar	81
4.2.7 Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Penerimaan Retribusi Pasar	82
4.2.9 Pengaruh Laju Inflasi terhadap Penerimaan Retribusi Pasar	83
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN- LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2006-2010.....	5
Tabel 1.2 Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kota Semarang Tahun 2006-2010.....	8
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PAD Kota Semarang tahun 2006-2010	9
Tabel 1.4 Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2006-2010.....	11
Tabel 1.5 Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Total Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2006-2010.....	13
Tabel 1.6 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Semarang Tahun 2006-2010	14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Per-kuartal Tahun 2002-2010	66
Tabel 4.2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Per-kuartal Tahun 2002-2010	67
Tabel 4.3 Laju Inflasi di Kota Semarang Per-kuartal Tahun 2002-2010.....	68
Tabel 4.4 Kriteria Tarif Menurut Kelas Pasar.....	71
Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Semarang Per-kuartal Tahun 2002-2010	72
Tabel 4.6 Deteksi Normalitas.....	74
Tabel 4.7 Deteksi Multikolinearitas	75
Tabel 4.8 Deteksi Heteroskedastisitas.....	76
Tabel 4.9 Deteksi Autokorelasi.....	76
Tabel 4.10 Uji Partial Autocorrelation.....	77
Tabel 4.11 Nilai Koefisien Determinasi.....	78
Tabel 4.12 Nilai F-Statistik	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	51
Gambar 4.1 Peta Kota Semarang.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Mentah.....	87
Lampiran 2 Pengolahan Data.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sedangkan arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai hal tersebut dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arjangga Wisnu Raga, 2011).

Penelitian Hadryan Putra (2010), menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi

masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasi keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Pada dasarnya otonomi daerah diberlakukan untuk membantupenyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepadamasyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan. Pemerintah daerahdipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugastersebut di atas, prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusatmemberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakanpemerintahannya di daerahnya sendiri. Sehubungan dengan haltersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumberekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pada saatini titik berat pemeberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo, 2002 dalam Baskoro, 2010).

Penelitian Edwin Haryo Baskoro (2010), menyimpulkan bahwa ketergantungan pada pusat harus seminimal mungkin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa menjadi bagian keuangan daerah terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan yang diperlukan untuk memenuhi belanja rutin, bahkan diharapkan dapat diperoleh surplus (Tabungan Daerah) guna belanja pembangunan.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendukung eksistensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah daerah sendiri dan dipungut oleh daerah sendiri. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah dana yang dapat bersumber dari:

- a. Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di

luar wilayah provinsi, dari perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN) atau dari masyarakat.

- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah provinsi.

Kota Semarang memiliki pendapatan daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya se-Jawa Tengah. Hal ini disebabkan antara lain karena Kota Semarang merupakan kota yang paling besar dan merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didukung data pada Tabel 1.1 bahwa Kota Semarang selalu memiliki realisasi penerimaan daerah yang paling besar diantara kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Realisasi penerimaan daerah kota Semarang selalu mengalami pertumbuhan positif. Tahun 2006 realisasi penerimaan daerah sebesar Rp. 1.055.716.854,00 .Pada Tahun 2008 tercatat realisasi penerimaan daerah Kota Semarang sebesar Rp. 1.337.697.047.000,00. Selanjutnya terjadi pertumbuhan positif pada tahun 2009 menjadi Rp. 1.538.490.538.000,00. Tahun 2010 menjadi pencapaian terbesar penerimaan daerah Kota Semarang sebanyak Rp. 1.623.567.255,00. Angka-angka tersebut sangat tinggi dan yang bisa mendekati hanya dari Kabupaten Cilacap yaitu sebesar Rp. 1.334.844.614.000,00 pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
Tahun 2006-2010(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010
Kab. Cilacap	932.736.973	1.024.452.227	1.163.540.429	1.200.047.963	1.334.844.614
Kab. Banyumas	803.084.869	869.377.558	928.013.856	1.014.142.227	1.221.869.030
Kab. Purbalingga	514.030.873	586.644.539	683.442.606	732.350.396	849.712.580
Kab. Banjarnegara	552.724.134	629.936.072	788.752.690	671.361.723	984.557.160
Kab. Kebumen	713.786.454	775.468.995	856.576.267	880.518.532	978.097.201
Kab. Purworejo	541.553.521	639.845.972	709.357.095	751.262.475	791.939.418
Kab. Wonosobo	490.201.304	543.694.625	607.408.041	672.541.035	707.921.059
Kab. Magelang	663.398.074	764.307.473	835.772.044	872.875.233	954.179.665
Kab. Boyolali	630.290.113	691.712.478	782.528.354	840.149.866	917.898.637
Kab. Klaten	763.401.801	881.645.648	976.687.587	984.534.437	1.060.169.605
Kab. Sukoharjo	549.271.166	615.262.195	687.729.032	732.951.736	798.432.615
Kab. Wonogiri	653.850.801	726.402.345	841.402.410	823.688.993	981.560.955
Kab. Karanganyar	547.727.748	641.317.357	771.365.017	770.365.627	874.553.917
Kab. Sragen	617.931.704	740.548.294	804.134.190	797.639.563	883.148.530
Kab. Grobogan	594.579.462	731.481.621	799.189.645	779.646.490	943.965.603
Kab. Blora	539.469.611	616.062.991	710.452.515	722.238.086	809.212.673
Kab. Rembang	486.077.398	510.244.058	576.641.200	579.272.808	681.400.890
Kab. Pati	612.560.418	786.092.424	886.445.867	929.172.521	1.001.675.113
Kab. Kudus	526.871.486	668.482.258	724.226.836	842.986.770	837.477.147
Kab. Jepara	539.720.214	689.656.991	754.683.277	721.568.932	754.988.143
Kab. Demak	497.960.436	564.200.485	682.566.355	739.925.740	650.278.218
Kab. Semarang	571.988.038	656.531.045	748.129.661	766.493.951	-
Kab. Temanggung	455.673.346	515.295.440	576.464.288	623.096.243	675.731.009
Kab. Kendal	576.116.856	649.416.780	717.458.504	790.488.557	901.333.718
Kab. Batang	441.187.114	503.000.814	483.271.432	616.827.818	644.772.561
Kab. Pekalongan	475.316.079	556.847.401	673.072.590	673.743.831	749.729.639
Kab. Pemalang	582.936.610	686.519.224	756.920.319	829.074.219	933.713.817
Kab. Tegal	658.887.735	710.722.353	-	860.862.334	946.105.335
Kab. Brebes	763.221.215	836.639.932	924.633.898	945.919.571	-
Kota Magelang	271.847.015	325.829.691	360.937.195	-	401.911.337
Kota Surakarta	510.880.034	603.158.341	751.267.162	728.938.188	828.634.956
Kota Salatiga	272.730.533	302.688.639	390.721.824	386.108.169	412.249.543
Kota Semarang	1.055.716.854	1.082.784.142	1.337.697.047	1.538.490.538	1.623.567.255
Kota Pekalongan	274.809.552	331.051.726	387.668.407	398.167.332	417.191.612
Kota Tegal	289.459.851	343.697.244	386.753.821	425.054.835	460.931.045
Jumlah	19.971.999.392	22.801.019.378	25.063.910.922	26.642.506.740	28.013.754.330

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, kemandirian suatu daerah ditunjukkan dengan bagaimana daerah tersebut mendapatkan dana dari sumber-sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sumber-sumber PAD diharapkan menjadi sumber pemasukan utama dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan daerah. Karena semakin besar kebutuhan daerah dibiayai oleh PAD maka akan makin tinggi kualitas otonominya. Sebaliknya semakin besar tingkat ketergantungan subsidi pemerintah terhadap APBD maka semakin rendah kualitas otonominya, yang akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah. (Hadryan Putra, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini berarti akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah umumnya mengalami banyak tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkatan pemerintah yang semakin dekat ke masyarakat menyebabkan makin sukar tugas pemerintah dalam menangani masalah-masalah pembangunan. Semakin nyata masalah pembangunan dan usaha-usaha perbaikan tingkat kehidupan masyarakat merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten harus mampu menggali potensi dan kendala pembangunan di daerahnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Intinya adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian Avaningrum (2009) dalam Hadryan Putra (2010), cara meningkatkan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Juga dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Upaya lain adalah terus menggali sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kota Semarang adalah kota yang masih berkembang dan sedang mencoba meningkatkan PAD agar memiliki kontribusi yang besar dalam membiayai pengeluarannya. Kontribusi PAD Kota Semarang terhadap Penerimaan Daerah masih relatif kecil. Hal ini ditunjukkan data pada Tabel 1.2 tahun 2006-2010 di bawah ini:

Tabel 1.2
Kontribusi PAD Terhadap Penerimaan Daerah Kota Semarang Tahun
2006 - 2010

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Penerimaan Daerah (Rupiah)	Proporsi kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah (%)
2006	224.822.679.542	1.055.716.854.521	21,30 %
2007	238.237.998.997	1.173.328.883.585	20,30 %
2008	267.914.250.403	1.337.697.047.131	20,03 %
2009	306.112.422.821	1.538.490.537.516	19,90 %
2010	328.559.470.680	1.623.567.254.798	20,24 %

Sumber: Dipenda Kota Semarang Tahun 2006-2010 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah berfluktuasi. Pada tahun 2006 kontribusinya sebanyak 21,3 % kemudian mengalami penurunan secara terus menerus selama 3 tahun berikutnya hingga mencapai 19,90 % pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010 kontribusinya mengalami peningkatan hingga menjadi 20,24 %. Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah kota Semarang cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa masih besarnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan masih kecilnya derajat otonominya. Perlu upaya nyata dari pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pengeluaran daerah.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua komponen penting dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kontribusi yang besar pada dua sektor tersebut menjadi penting karena keduanya merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai kegiatan daerah seperti penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (Liana Dwi Puspita, 2009:24 dalam Hadryan Putra, 2010). Setiap pemerintah daerah memiliki berbagai upaya dan kebijakan dalam

meningkatkan pendapatan daerahnya. Upaya dan kebijakan tersebut tentunya juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya. Kota Semarang memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan tumbuh mengikuti perubahan jaman. Tabel 1.3 menunjukkan penerimaan PAD Kota Semarang dari tahun 2006 – 2010:

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan PAD Kota Semarang tahun 2006 - 2010

Tahun	Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (%)	Laba Perusda (%)	PAD Lain-lain (%)	Total PAD (%)
2006	114.570.395.598 (50,96 %)	71.725.388.543 (31,9 %)	3.556.374.684 (1,58 %)	349.70.520.717 (15,55 %)	224.822.679.542 (100 %)
2007	128.535.917.610 (53,95 %)	77.049.365.967 (32,34 %)	3.824.208.317 (1,61 %)	28.828.507.103 (12,1 %)	238.237.998.997 (100 %)
2008	143.460.194.601 (53,55 %)	84.757.259.284 (31,64 %)	5.405.367.935 (2,02 %)	34.291.428.583 (12,8 %)	267.914.250.403 (100 %)
2009	154.505.287.140 (50,47 %)	69.874.090.022 (22,83 %)	5.467.609.974 (1,79 %)	76.265.435.685 (24,91 %)	306.112.422.821 (100 %)
2010	177.680.372.947 (54,08 %)	80.558.718.995 (24,52 %)	6.210.426.962 (1,89 %)	64.109.951.776 (19,51 %)	328.559.470.680 (100 %)

Sumber: Dipenda Pemerintah Kota Semarang (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, Realisasi PAD kota Semarang tahun 2006-2010 menunjukkan bahwa retribusi daerah menempati urutan kedua setelah pajak daerah dalam kontribusinya terhadap total penerimaan PAD kota Semarang. Meskipun tidak merupakan kontribusi utama terhadap total PAD kota Semarang, Retribusi Daerah tetap merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD kota Semarang. Sumbangan Retribusi Daerah pada tahun 2006 mencapai Rp. 71.725.388.543,00 yang memberikan kontribusi sebanyak 41,15 % terhadap total PAD. Kemudian pada tahun 2007 kontribusi Retribusi Daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 77.049.365.967,00 dimana memberikan kontribusi terhadap total PAD sebanyak 32,34 %. Penurunan kontribusi terhadap

total PAD pada tahun 2007 ini disebabkan karena sumbangan penerimaan PAD yang lain juga mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar Rp. 84.757.259.284,00 yang memberikan kontribusi terhadap total PAD sebanyak 31,64 %. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan terhadap sumbangan PAD menjadi sebesar Rp. 69.874.090.022,00 dan kontribusi terhadap total PAD juga mengalami penurunan menjadi sebanyak 22,83 %. Tetapi pada tahun 2010 kembali terjadi peningkatan dalam sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD sebesar Rp. 80.558.718.995,00 yang juga menaikkan kontribusi terhadap total PAD menjadi sebesar 24,53 %.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas dari masing-masing pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam memungut retribusi (Purnamasari:2006 dalam Hadryan Putra, 2010).

Tabel 1.4
Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2006 - 2010

Jenis Retribusi	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pelayanan Kesehatan	22.393.253.631	27.357.328.229	28.769.699.349	3.631.995.000	4.746.111.561	-7,34
Pelayanan Kebersihan	5.531.580.553	5.598.282.500	5.771.802.925	5.866.744.012	6.145.140.950	2,67
Pengg.Biaya Cetak KTP	3.567.633.500	3.600.275.500	3.902.837.000	3.954.901.500	5.587.668.500	12,98
Pelayanan Makam	110.625.000	120.987.500	129.155.000	157.395.000	248.955.000	24,03
Parkir di Tepi Jalan	1.350.543.669	1.440.300.000	1.940.869.900	1.583.697.100	1.350.071.375	2,06
Pasar	7.905.585.985	8.808.990.943	9.824.245.886	12.097.540.723	12.819.305.894	12,88
Penguji. Kend. Bermotor	4.621.849.110	4.521.980.950	4.824.373.600	4.214.514.490	3.994.227.030	-3,33
Pemerik. Alat Pemadam	18.407.500	18.405.000	21.070.000	22.895.000	26.510.000	9,72
Pengg. Biaya Cetak Peta	3.088.756.300	3.784.757.660	4.134.165.225	3.226.498.030	4.002.947.900	8,46
Penyedotan Kakus	49.955.000	55.065.000	50.625.000	85.860.000	94.060.000	20,32
Pelayanan Pendidikan	936.695.000	1.052.019.500	1.182.304.000	0	0	12,34
Pem. Kekayaan Daerah	8.344.664.400	2.815.065.060	3.584.953.005	3.808.995.710	4.269.215.950	-5,14
Terminal	326.183.300	365.299.300	362.020.300	333.390.200	374.564.850	3,88
Tempat Khusus Parkir	496.062.000	513.649.000	466.661.000	519.859.000	575.447.000	4,12
Tmp. Rekr. & Olah Raga	687.249.250	1.240.293.750	1.304.299.500	2.577.460.500	2.604.007.250	46,06
Penjualan Produksi	0	2.527.435.500	2.722.628.000	2.360.932.500	2.209.074.000	-3,99
Tempat Penginapan	452.864.500	668.220.000	706.080.000	750.286.050	768.234.000	15,46
Pelayan. Kepelabuhanan	0	0	25.085.100	5.721.000	11.490.000	11,82
Ijin Mendirikan Bangunan	8.729.353.816	8.581.372.700	9.944.205.670	7.457.572.132	10.073.715.700	6,06
Ijin Gangguan/Keramaian	2.876.742.500	3.352.992.200	4.459.141.500	3.448.281.920	4.744.832.200	16,11
Ijin Trayek	89.385.625	113.976.875	106.826.875	93.841.250	45.328.750	10,65
Ijin Penyam. Jalan Masuk	0	305.748.800	297.135.449	553.344.605	543.711.400	27,22
Ijin Sewa Alat Berat	0	85.005.000	88.535.000	108.890.000	118.335.000	11,93
Ijin Usaha Jasa Konstruk.	0	0	0	157.600.000	165.100.000	4,75
Reklame	0	0	0	12.669.944.300	14.834.164.685	17,08
Hasil Sewa Laboratorium	112.110.000	121.915.000	138.540.000	185.930.000	206.500.000	16,91
Total	71.725.388.543	77.049.365.967	84.757.259.284	69.874.090.022	80.558.718.995	3,78

Sumber: Dipenda Pemerintah Kota Semarang 2006-2010

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan (Edwin Haryo Baskoro:2009).

Dalam Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa retribusi daerah merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan penerimaan retribusi lainnya. Dari berbagai pemungutan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Semarang tahun 2006-2010 dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan merupakan penyumbang terbesar dalam rentang waktu tahun 2006-2008. Namun pada dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 sumbangannya menurun drastis dikarenakan sumbangan dari sektor rumah sakit umum berkurang dikarenakan sudah tidak dianggarkan lagi.

Retribusi pasar merupakan penyumbang kedua terbesar setelah retribusi pelayanan kesehatan. Meskipun kedua terbesar, retribusi pasar memiliki data yang lebih aktual dan selalu meningkat tiap tahunnya dibandingkan dengan retribusi pelayanan kesehatan yang cenderung fluktuatif. Dapat dilihat dalam Tabel 1.4, retribusi pasar mengalami peningkatan tiap tahunnya dari Rp. 7.941.473.889,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 12,819,305,894,00 pada tahun 2010.

Retribusi pasar merupakan pos retribusi yang cukup potensial karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan Kota Semarang mengelola dan menarik retribusi dari 53 pasar tradisional. Dampaknya adalah memberikan tingkat konsumsi masyarakat Kota Semarang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomiannya dilihat dari pertumbuhan PDRB perkapita. Perkembangan perekonomian tersebut harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi.

Tabel 1.5
Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Total Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Rupiah)

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Laju Pertumbuhan	Realisasi retribusi daerah	Kontribusi realisasi retribusi pasar terhadap realisasi retribusi daerah (%)
2006	7.905.585.985	-0,83	71.725.388.543	11,02
2007	8.808.990.943	10,92	77.049.365.967	11,43
2008	9.824.245.886	11,53	84.757.259.284	11,59
2009	12.097.540.723	23,14	69.874.090.022	17,31
2010	12.819.305.894	5,97	80.558.718.995	15,91

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang(data diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan kontribusi realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap total realisasi retribusi daerah Kota Semarang memiliki kecenderungan berfluktuasi dari tahun 2006-2010. Nilai terendah kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah terjadi pada tahun 2006 sebesar 11,02 persen. Selanjutnya terjadi peningkatan hingga pada tahun 2009 terjadi peningkatan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 17,31 persen, dimana angka tersebut adalah yang terbesar dalam kurun waktu tahun 2006-2010. Realisasi retribusi daerah tahun 2009 menurun menjadi Rp. 69.874.090.022 dari tahun 2008 sebesar Rp. 84.757.259.284. Hal ini disebabkan oleh

penurunan beberapa retribusi dari dinas pendidikan, dinas pertamanan dan rumah sakit umum sudah tidak dianggarkan lagi. Pada tahun 2010 terjadi penurunan dengan hanya memberikan kontribusi sebesar 15,91 persen.

Retribusi pasar terkait oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi yang dapat dipungut. Tingkat sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari perkembangan PDRB perkapita suatu daerah (Avianingrum, 2009). Semakin tinggi PDRB perkapita, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah karena semakin besar pula penerimaan dari retribusi pasar.

Tabel 1.6
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Semarang
Tahun 2006-2010

Tahun	PDRB Perkapita (juta rupiah)	Pertumbuhan (persen)
2006	11.571.407	4,33
2007	12.104.672	4,61
2008	12.617.054	4,23
2009	13.121.875	4,00
2010	13.731.387	4,65

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tabel 1.6 menunjukkan pertumbuhan PDRB perkapita Kota Semarang atas dasar harga konstan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Pertumbuhan PDRB perkapita kota Semarang memiliki kecenderungan berfluktuasi dalam kurun waktu 6 tahun tersebut. Meskipun cenderung berfluktuasi, perkembangan PDRB perkapita selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 4,65 persen. Sedangkan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 4 persen. Hal ini diasumsikan bahwa

kesejahteraan penduduk semakin meningkat dilihat dari peningkatan PDRB perkapita setiap tahunnya.

Selain PDRB perkapita masih ada beberapa faktor dalam penerimaan retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Penelitian Soelarti (2007), menghasilkan bahwa penerimaan retribusi pasar memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Artinya apabila jumlah penduduk naik maka penerimaan retribusi pasar akan ikut naik. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar adalah perubahan laju inflasi. Elastisitas perubahan laju inflasi memiliki pengaruh yang cukup dalam penerimaan retribusi pasar (Wasirin, 2000).

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh PDRB perkapita, jumlah penduduk dan laju inflasi terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar di kota Semarang.

1.2 Rumusan masalah

Di era otonomi daerah, setiap daerah dituntut harus mampu untuk menggali semua sumber PAD-nya. Sumber-sumber PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kota Semarang adalah kota yang paling besar di provinsi Jawa Tengah yang memiliki penerimaan daerah terbesar se-Jawa Tengah dan sedang mencoba meningkatkan PAD agar memiliki kontribusi yang besar dalam membiayai pengeluarannya.

Salah satu komponen PAD yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah retribusi daerah,

karena retribusi daerah merupakan komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah yang potensial di Kota Semarang adalah retribusi pasar. Karena kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah selalu naik dari tahun 2006-2010 dan dengan banyaknya jumlah pasar yaitu 46 pasar yang berada di Kota Semarang. Dengan semakin meningkatnya realisasi retribusi pasar tiap tahun diharapkan dapat menopang sektor ekonomi daerah. Tetapi pada beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan terjadi pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pasar yang fluktuatif. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain oleh PDRB perkapita, pertumbuhan penduduk dan laju inflasi di Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB perkapita terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2002-2010
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2002-2010
3. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2002-2010

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran kepada Dinas Pasar agar dapat lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini, terutama untuk dapat mengetahui perkembangan peranan retribusi pasar Kota Semarang dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna pengungkapan penelitian mudah dipahami dan lengkap, maka penelitian ini disusun dengan alur pembahasan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang merupakan penjelasan mengenai dasar teoritis penelitian, penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian yang diamati dalam suatu gambar dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari definisi operasional variabel penelitian yang diamati, jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data sertametode dan alat analisis yang digunakan beserta penjelasan pengukurannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dai deskripsi dari obyek penelitian serta pembahasan mengenai hasil perhitungan data dengan alat analisi yang dipakai.

BAB V PENUTUP

Bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Keuangan Negara

Ekonomi Publik atau Ilmu Keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut (Suparmoko, 1992). Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peranan pemerintah sangat penting dalam perekonomian karena pemerintah merupakan penggerak utama dalam proses pembangunan. Menurut Adam Smith (Mangkoesoebroto, 1991), fungsi pemerintah adalah:

1. Memelihara pertahanan dan keamanan
2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan pihak swasta.

Menurut Wine Safitri (2009) dalam Hadryan Putra (2010) pemerintah suatu negara pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi alokasi, meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat
2. Fungsi distribusi, meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan
3. Fungsi stabilisasi, meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter

Menurut Caroline (2005), fungsi distribusi dan stabilisasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakatnya. Hal ini juga perlu diperhatikan kondisi dan situasi di masing-masing wilayah, karena setiap wilayah mempunyai karakteristik kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Dengan demikian pembagian ke tiga fungsi tersebut sangat penting bagi landasan dalam penentuan dasar-dasar pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara tegas dan jelas.

2.1.2 Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Soejanto, 1992) yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*), pemerataan dan keadilan (*equity*), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah

mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan adanya otonomi, pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis karena dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri yang lebih tahu apa yang dibutuhkan daerah tersebut (Gunawan S, 1999). Ia juga mengatakan “Hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat”.

2.1.3 Keuangan Daerah

Dalam “sistem administrasi keuangan daerah” dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995).

Menurut HAW. Widjaja (2002:143) dalam Hadryan Putra (2010), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam APBD. Sedangkan menurut Ahmad Fauzi dan Iskandar (1982) dalam Hadryan Putra (2010), keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola, mulai merencanakan,

melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama ini pembiayaan pembangunan di daerah lebih didasarkan kepada seberapa besar subsidi/bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari proporsi sumbangan dan bantuan total penerimaan daerah. Lebih lengkap penjelasan mengenai kondisi keuangan daerah dikemukakan oleh (Alfians, 1985) :

1. Masih sangat minimnya sumbangan pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah yang dimanfaatkan guna kepentingan umum di daerah.
2. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat.
3. Kontribusi pajak daerah dan PAD lainnya terhadap penerimaan total sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

Hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara masing-masing tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran akibat adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan antara pembagian tugas pemerintahan, agar

bagaimana antara potensi dan sumberdaya daerah masing-masing daerah dapat sesuai (Devas, 1989).

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah terhadap penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya. Oleh karena itu perlu terus ditingkatkan usaha pemenuhan keuangan daerah dalam pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan tersebut melalui berbagai program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah. Program-program ini meliputi usaha peningkatan peranan daerah dalam pembiayaan daerah, peningkatan efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pemantapan manajemen keuangan daerah (Soejanto, 1992). Masih menurutnya, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan yang meliputi :

1. Mobilisasi dana yang dapat digali dari potensi daerah sendiri secara wajar. Tertib dan dengan tetap berwawasan kesatuan dan berlandaskan prinsip otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.
2. Perlu desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program serta pengambilan keputusan dalam memilih proyek-proyek daerah dan pelaksanaannya.
3. Penyempurnaan pelaksanaan subsidi, bantuan dan pinjaman yang dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat daerah setempat.

4. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, khususnya di bidang keuangan daerah dan tetap diarahkan untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
5. Usaha memperkuat sistem pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber ekonomi dan dana yang terbatas untuk pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang optimal.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan. Keuangan daerah inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri (S. Pamudji, 1989).

2.1.4 Kriteria Sumber Penerimaan Daerah

Untuk menilai potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari suatu penerimaan daerah adalah sebagai berikut (Davey 1988:40):

- a. Kecukupan dan Elastisitas

Elastisitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaannya berkembang secara otomatis. Dalam hal ini elastisitas memiliki dua dimensi, yaitu: yang pertama adalah pertumbuhan potensial dari dasar pengenaan retribusi itu sendiri. Kedua, sebagai kemudahan untuk memungut retribusi

tersebut. Sumber pendapatan daerah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang dikeluarkan. Jika suatu sumber penerimaan seperti retribusi hanya menghasilkan presentase yang kecil diatas anggaran yang dikeluarkannya, akan banyak menimbulkan kerugian, yakni ongkos pungut akan menjadi lebih besar, upaya administrasi terbagi-bagi, pembebanan sulit dicapai secara adil dan kesan yang negatif terhadap kemampuan keuangan daerah akan timbul.

b. Pemerataan/keadilan

Prinsip keadilan disini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dapat ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas dianut oleh semua pemerintahan, namun prakteknya tidak selalu dilaksanakan.

Berdasarkan Musgrave (1987:232) mengenai prinsip yang bertujuan untuk mencapai keadilan, maka terdapat dua pendekatan yang membedakannya, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Berdasarkan teori yang dikemukakan Adam Smith serta beberapa penulis lain, suatu sistem pajak/retribusi dapat dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak/retribusi, sesuai dengan manfaat yang didapatkannya dari jasa-jasa pemerintah.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability-to-pay*).

Berdasarkan pendekatan ini, perekonomian membutuhkan suatu jumlah penerimaan pajak/retribusi diminta membayar sesuai dengan kemampuannya.

c. Kemampuan Administrasi

Suatu sumber penerimaan haruslah didukung oleh administrasi yang memadai yang akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam melakukan perhitungan, pengawasan dan pelayanan pungutan. Kemampuan administrasi mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut retribusi sebanding dengan hasil yang mampu dicapai. Secara teoritis, retribusi relatif sederhana dan mudah untuk dipungut dengan biaya relatif rendah. Kemudahan dalam pungutan retribusi disebabkan oleh tingkat konsumsi yang mudah diukur, sehingga pemakai hanya membayar apa yang telah dikonsumsi.

Namun demikian, salah satu kelemahan retribusi adalah sulitnya menentukan target yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi sangat tergantung pada jumlah jasa yang dikonsumsi masyarakat.

d. Kesepakatan Politis

Kesepakatan Politis sangat dibutuhkan dalam pengenaan retribusi, penetapan struktur tarif, memutuskan apa yang harus dibayar, bagaimana retribusi tersebut ditetapkan, serta memberikan sanksi

kepada para pelanggar yang mana hal-hal tersebut tergantung pada 2 (dua) faktor, yaitu: kepekaan dan kejelasan dari retribusi tersebut, serta adanya keleluasaan dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom, menurut UU No. 32 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah dana yang bersumber dari :

- a. Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di luar wilayah propinsi, dari

perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN), atau dari masyarakat.

- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di wilayah propinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah propinsi.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU no. 33 tentang Perimbangan Keuangan Ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.7 Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindarkan oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat (Ibnu Syamsi, 1986).

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atau UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.8 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Musgrave, ciri-ciri retribusi yang terpat dalam retribusi daerah adalah:

1. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
2. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayar retribusi.
3. Bagi yang telah menikmati jasa lalu tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa.
4. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Banyamin Harits, ciri-ciri mendasar dari retribusi yaitu:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk.

- d. Dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sebagai bagian dari sumber penerimaan daerah, retribusi adalah salah satu penyumbang penting Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan bagi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.1.9 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Adapun dasar hukum pemungutan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah pemungut dikenakan berdasarkan peraturan masing-masing daerah pemungut retribusi. Peraturan Daerah tentang retribusi tersebut baru dapat berlaku setelah mendapat pengesahan.

2.1.10 Fungsi Retribusi Daerah

Sebagaimana pajak, maka fungsi dari retribusi adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002) :

- a. Penerimaan

Fungsi penerimaan adalah merupakan fungsi pokok dari retribusi, artinya retribusi dijalankan sebagai alat untuk menutup APBD, terutama yang

menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.

b. Pengatur

Fungsi pengatur retribusi artinya retribusi digunakan sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial dari masyarakat.

2.1.11 Syarat Pemungutan Retribusi Daerah

Agar pemungutan retribusi daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka retribusi harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2002) :

a. Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan)

Hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum yang lainnya, yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan retribusi baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Walaupun keadilan itu relatif, salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencapai keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan retribusi harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga diperoleh tekanan yang sama atas seluruh masyarakat.

b. Pemungutan retribusi harus berdasarkan UU (syarat yuridis)

Hukum retribusi harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara ataupun warganya. Disamping itu dalam menyusun Undang-Undang harus diusahakan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan retribusi.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan retribusi dan kebijakan retribusi jangan sampai menghambat perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat dalam mencapai kemakmuran.

- d. Pemungutan retribusi harus efisien (syarat finansial)

Pemungutan retribusi hendaknya jangan memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan retribusi hendaknya mencegah inflasi.

- e. Sistem pemungutan retribusi harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi, retribusi harus diterapkan dengan sistem retribusi yang sederhana sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menghitungnya.

2.1.12 Faktor Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah

Tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Devas, 1989) :

1. Faktor Jumlah Subyek atau Penduduk Retribusi Daerah

Retribusi Daerah hanya dikenakan pada mereka yang telah memanfaatkan jasa atau pelayanan pemerintah daerah.

2. Faktor Jenis dan Jumlah Retribusi Daerah

Berkembangnya perekonomian daerah akan mempengaruhi pengeluaran pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa dan barang pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jenis

retribusi daerah yang dipungut akan semakin tinggi pula pendapatan dari retribusi yang dapat ditarik dari warganya.

3. Faktor Tarif

Besarnya tarif yang dikenakan tergantung pada pendapatan perkapita daerah sekaligus akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah.

4. Faktor Efektifitas dan Efisiensi Pungutan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, kualitas, kuantitas dan kapasitas aparat pelaksana amat menentukan besarnya retribusi daerah.

Sedangkan menurut (Suparmoko, 1992) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pembangunan Daerah

Banyaknya pembangunan yang ada di suatu daerah yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sekitarnya yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut.

2. Pendapatan Perkapita Daerah

Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi pula penerimaan retribusi daerah.

3. Tarif

Adanya tarif progresif atau regresif yang diterapkan oleh pemerintah untuk pelayanan publik akan mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi suatu daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2002) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Penduduk

Faktor penduduk menjadi faktor yang dilematis dalam artian bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi wajib pajak dan retribusinya, akan tetapi semakin tinggi jumlah penduduk juga akan menjadi beban daerah tersebut dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB suatu daerah juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena semakin besar PDRB suatu wilayah berarti semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu daerah.

2.1.13 Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Secara konseptual, terdapat banyak pro dan kontra atas pernyataan mendasar mengenai perlu tidaknya penyediaan suatu barang dan jasa dibebankan retribusi. Mereka yang setuju penyediaan barang dan jasa dibebankan retribusi berpihak pada beberapa pendapat :

- **Pertama**, jika penyediaan barang atau jasa memberikan manfaat pribadi (*private goods*), misal masalah pertanahan, maka pajak merupakan alternatif pembiayaan terbaik. Namun demikian, terdapat masalah mendasar untuk menarik garis batas yang tegas antara barang pribadi dan barang publik, sebab sangat mungkin suatu penyediaan jasa mengandung kedua unsur tersebut. Sebagai contoh, jasa

pendidikan, selain memberikan manfaat pribadi kepada mereka yang sekolah, juga akan memberikan manfaat sosial kepada publik. Untuk pembiayaan jasa seperti ini dapat diambil jalan tengah, campuran antara pajak dan retribusi. Jika unsur manfaatnya lebih besar dari pada *public goods*-nya, maka proporsi pembiayaan dari pajak lebih tinggi dibanding dengan retribusi. Sebaliknya, jika unsur *private goods*-nya lebih tinggi, maka unsur pembiayaan dari retribusi lebih dominan dibandingkan pajak.

- **Kedua**, retribusi merupakan media untuk *allocative economic efficiency*. Retribusi merupakan sinyal harga dari barang dan jasa yang disediakan pemerintah. Tanpa harga permintaan dan penawaran tidak akan mencapai harga keseimbangan dan akibatnya alokasi sumber daya tidak akan mencapai efisiensi ekonomi. Dengan harga, para pelaku ekonomi memiliki kebebasan memilih jumlah konsumsi suatu barang dan jasa. Mekanisme harga memainkan peran dalam mengalokasikan sumber daya, melalui pembatasan permintaan dan pemberian insentif untuk menghindari pemborosan konsumsi. Namun apabila tidak tepat, justru akan menyebabkan mis-alokasi sumber daya. Selain itu karena distribusi pendapatan tidak merata, maka secara etika yang kaya mestinya membayar lebih mahal dibandingkan yang miskin. Namun, pemberian alokasi kepada yang miskin justru bertentangan dengan prinsip alokasi sumber daya yang efisien.

- **Ketiga**, prinsip kemanfaatan, mereka yang tidak mendapat manfaat dari penyediaan barang atau jasa tidak harus membayar. Sebaliknya, mereka yang tidak membayar dapat dikecualikan dalam mengkonsumsi.

Sedangkan yang tidak setuju dengan pemungutan retribusi berpijak pada pendapat berikut :

- **Pertama**, retribusi memerlukan sistem administrasi yang dapat mengecualikan pihak yang tidak membayar untuk tidak menikmati, misalnya dengan pemasangan portal, yang pada akhirnya justru akan meningkatkan biaya penyediaan barang/jasa tersebut.
- **Kedua**, mereka yang miskin tidak dapat membayar retribusi untuk air bersih atau transportasi umum. Namun demikian, argumen ini dihadapkan pada pendapat yang menyangsikan kemampuan pemerintah (penyedia jasa) dalam membedakan secara tegas barang dan jasa kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar. Suatu barang atau jasa yang merupakan barang kebutuhan pokok bagi seseorang, sangat mungkin bukan kebutuhan pokok bagi pihak lain.

Kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah bahwa suatu penyelesaian barang dan jasa yang dibiayai dari pajak atau retribusi tergantung pada “derajat kemanfaatan” barang atau jasa itu sendiri. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan *private goods*, maka pembiayaannya berasal dari retribusi. Sebaliknya, semakin dekat kemanfaatan suatu barang atau jasa dengan *public goods*, maka pembiayaan berasal dari pajak.

2.1.14 Retribusi Pemerintah Daerah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Seseorang bebas menentukan besar jasa tertentu yang akan dinikmati, harga jasa itu memegang peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan memberikan isyarat yang perlu kepada *supplier* mengenai besar produksi jasa tersebut.

Penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Oleh karena itu, harga harus disesuaikan sehingga permintaan dan penawaran akan barang dan jasa yang bersangkutan dapat selaras. Teori ekonomi mengatakan, harga barang dan jasa yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*). Harga akan muncul apabila di dalam pasar terdapat persaingan bebas. Karena sebagian jasa pemerintah disediakan dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomis untuk masyarakat paling tinggi apabila pemerintah menetapkan harga jasa yang bersangkutan seolah-olah terdapat pesaing di dalamnya, dan berproduksi pada titik *marginal cost* sama dengan *marginal revenue*.

Pendapat ini memberikan masalah antara lain :

- a. Pemerintah mungkin tidak mengetahui penuh susunan biaya jasa yang bersangkutan untuk menghitung berapa *marginal cost* jasa tersebut. Meski dengan bahan keterangan yang baik sekalipun, *marginal cost* jasa yang disediakan pemerintah mungkin jauh lebih sulit ditentukan dibanding dengan *marginal cost* barang yang dihasilkan oleh swasta.

- b. Terdapat masalah apakah *marginal cost* diukur dalam jangka panjang atau jangka pendek.
- c. Asas harga sama dengan *marginal cost* mungkin tidak dapat menutup biaya pembelian barang modal.
- d. Upaya menebus biaya melalui pungutan itu sendiri, mungkin akan menaikkan harga.
- e. Terdapat masalah dampak terhadap pihak luar. Jasa yang disediakan pemerintah banyak yang bersifat campuran antara manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi pribadi.

2.1.15 Klasifikasi Retribusi Daerah

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah bertujuan untuk mewujudkan tercapainya peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu aturan pelaksanaan lain seperti PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah membuka peluang daerah untuk semakin meningkatkan retribusi daerah.

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dikelompokkan sebagai berikut (Suparmoko, 1992) :

A. Retribusi Jasa Umum

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, ada beberapa kriteria yang digunakan, kriteria tersebut adalah :

1. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam asas pelaksanaan desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan sampah.
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi/badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berpenghasilan cukup.
4. Retribusi untuk pelayanan-pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
6. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Adapun yang termasuk di dalam retribusi pelayanan jasa umum antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang Dibuat Pemerintah Daerah
- j. Retribusi Pelayanan Air Bersih
- k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

B. Retribusi Jasa Usaha

Yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha. Harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan oleh swasta dianggap belum memadai.
2. Harus terdapat modal yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah, seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- b. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- c. Retribusi Pelayanan Terminal
- d. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Tempat Penitipan Anak
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan
- g. Retribusi Penyedia Kakus
- h. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- k. Retribusi Pengelolaan Air Limbah
- l. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Sama halnya dengan pajak, retribusi perizinan juga mempunyai peranan ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya retribusi perizinan dapat digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain:

- a. Retribusi Izin Penggunaan Tanah
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- c. Retribusi Izin Gangguan/Keamanan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Pengambilan Hasil Hutan

2.1.16 Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. sehingga dibutuhkan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan yang sudah ada. (Liana Dwi Puspita, 2009:251).

Liana Dwi Puspita (2009:252) dalam Hadryan Putra (2010) menambahkan bahwa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Hal yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain dengan mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar pajak/retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Tindakan yang dilakukan untuk memperkuat proses pemungutan, salah satunya dengan mempercepat penyusunan perda, melakukan perubahan tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

2.1.17 Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (Sri Hartono, 2005:125) dalam Hadryan Putra (2010). Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa took / kios, counter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah bahwa mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah pengenaan retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan (Mcmaster, 1991).

2.1.18 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian

besar harga barang-barang lain. Menurut teori uang klasik, perubahan dalam tingkat harga keseluruhan adalah seperti perubahan dalam unit-unit ukuran. Karena sesungguhnya kesejahteraan ekonomi masyarakat bergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga (Mankiw, 2007).

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran pemerintah sedangkan masyarakat enggan untuk membayar retribusi yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Teori ini didasarkan pada teori dimana masyarakat punya tingkat toleransi yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya retribusi yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Apabila tingkat ini terlampaui maka akan terjadi inflasi. Dampaknya adalah pedagang akan enggan membayar retribusi bahkan bukan tidak mungkin ada yang gulung tikar. Hal ini akan menyebabkan menurunnya penerimaan retribusi pasar.

2.1.19 Kependudukan

Dalam teorinya Malthus berpendapat bahwa penduduk bertambah sesuai dengan deret ukur, sedangkan kebutuhan pangan bertambah sesuai dengan deret hitung.

Artinya semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin banyak kebutuhan pangan yang harus dipenuhi. Teori ini juga didukung oleh Solow yang berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk akan menciptakan *labor* yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pendapat Malthus, semakin banyak jumlah penduduk maka kebutuhan hidup manusia semakin banyak sehingga dengan besarnya permintaan akan memicu

timbulnya pelaku pasar baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan banyaknya pelaku pasar (pedagang) baru tersebut akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

2.1.20 PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Richardson, 1991).

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Mankiw memperkuat teori tersebut dengan menyatakan bahwa untuk mengukur pertumbuhan perekonomian adalah dengan mengukur PDRB perkapita suatu wilayah. Dalam hal ini berarti PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu wilayah. Artinya semakin besar pendapatan masyarakat maka kemampuan suatu masyarakat untuk berbelanja di pasar akan semakin besar sehingga akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang analisis permintaan retribusi pasar serta permasalahan dan faktor-faktornya telah dilakukan oleh Soelarti (1997); Imam Wasirin (2000); Bambang Tri Atmojo (2004); Edwin Haryo Baskoro (2010); Hadryan Putra Kurniawan Akbar (2010). Untuk Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL DAN PENULIS	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Soelarti. 1997. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kabupaten Indramayu	Mengidentifikasi potensi penerimaan retribusi pasar	Variabel Dependen: Retribusi Pasar Variabel Independen: Jumlah penduduk, PDRB perkapita	Menggunakan analisis potensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta menganalisis besarnya pengaruh jumlah penduduk dan PDRB perkapita terhadap penerimaan retribusi pasar	Rata-rata potensi retribusi pasar yang dapat direalisasikan sebagai pendapatan nyata adalah 31,08% sedangkan efisiensi dan efektivitasnya adalah 80,76% dan 101,29% Elastisitas penerimaan retribusi pasar terhadap PDRB perkapita adalah 0,273 sedangkan terhadap jumlah penduduk adalah 2,804
2	Imam Wasirin. 2000. Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang	Mengetahui peranan retribusi pasar terhadap PAD dalam otonomi daerah di kota Semarang	Variabel Dependen: Retribusi Pasar Variabel Independen: Jumlah penduduk, PDRB perkapita, perubahan laju inflasi, potensi pasar, pemungutan retribusi	Menggunakan analisis potensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta menganalisis besarnya pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan perubahan harga inflasi	Laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar sebesar 5.26% Tingkat efisiensi biaya pemungutan retribusi pasar sebesar 3% sedangkan tingkat efektivitas pemungutan

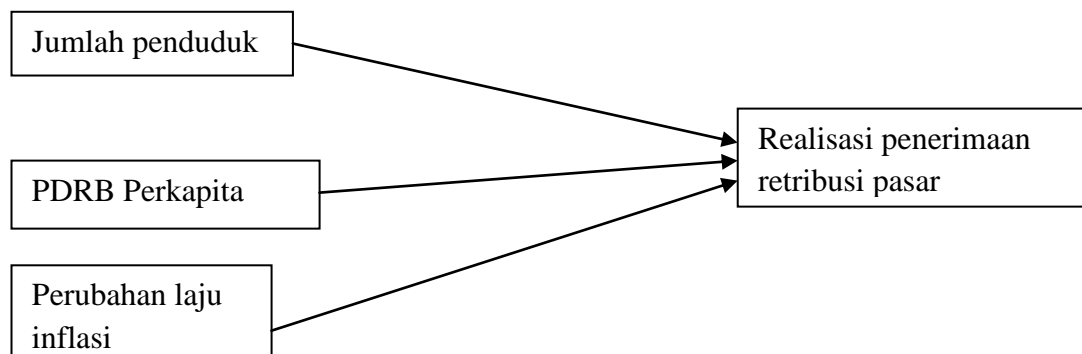
			pasar	serta potensi pasar terhadap penerimaan retribusi pasar	retribusi pasar sebesar 86,96% Tingkat elastisitas jumlah penduduk 3,57 sedangkan terhadap PDRB perkapita 0,29 dan terhadap perubahan harga inflasi sebesar 0,81
3	Bambang Tri Atmojo. 2004. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Batang Tahun 1998-2002	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah pedagang, jumlah kios dan jumlah los pasar terhadap penerimaan retribusi pasar	Variabel Dependen: Retribusi Pasar Variabel Independen: jumlah los, jumlah kios, jumlah pedagang	Menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji t	Terdapat pengaruh positif jumlah pedagang, jumlah kios, dan jumlah los terhadap penerimaan retribusi pasar. Perhitungan uji t menunjukkan hasil $t_{hit} > t_{tab}$ untuk seluruh variabel yaitu $t_{X1} = 32,046 > t_{tab} = 3,182$, $t_{X2} = 108,637 > t_{tab} = 3,182$ dan $t_{X3} = 79,180 > t_{tab} = 3,182$ yang berarti bahwa masing-masing variabel berpengaruh positif

					terhadap retribusi pasar.
4	Edwin Haryo Baskoro. 2010. Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Semarang	Menganalisis penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Semarang	<p>Variabel Dependen: Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>Variabel Independen: Jumlah kunjungan pasien puskesmas perkecamatan, jumlah penduduk perkecamatan, PDRB perkapita perkecamatan.</p>	Menggunakan analisis regresi linier berganda	Yang memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan adalah variabel jumlah kunjungan pasien dan PDRB perkapita. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.
5	Hadryan Putra Kurniawan Akbar. 2010. Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Surakarta	Menganalisis penerimaan retribusi pasar di kota Surakarta	<p>Variabel Dependen: Penerimaan Retribusi Pasar</p> <p>Variabel Independen: Jumlah los terisi, jumlah kios terisi, PDRB perkapita</p>	Analisis potensi, analisis efektivitas dan analisis besarnya pengaruh PDRB perkapita, jumlah los dan kios terisi terhadap penerimaan retribusi pasar	Penerimaan retribusi pasar dinyatakan efektif dan efisien PDRB perkapita dan jumlah los terisi berpengaruh positif dan signifikan, jumlah kios terisi tidak signifikan

2.3 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Semarang selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil kontribusinya terhadap retribusi daerah. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan retribusi pasar di Kota Semarang telah berjalan efektif dan efisien dan bagaimana pengaruh PDRB perkapita, pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan laju inflasi terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Soelarti(1997); Imam Wasirin(2000); Bambang Tri Atmojo(2004); Edwin Haryo Baskoro(2010); Hadryan Putra Kurniawan Akbar(2010).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena kesimpulan tersebut baru berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Bedasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di depan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga PDRB perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar. Berarti semakin besar jumlah PDRB perkapita maka akan semakin besar pula realisasi penerimaan retribusi pasar.
2. Diduga pertumbuhan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar. Berarti semakin banyak jumlah penduduknya semakin besar pula realisasi penerimaan retribusi pasar.
3. Diduga perubahan laju inflasi berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar. Berarti semakin besar laju inflasi semakin besar pula realisasi penerimaan retribusi pasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi Penerimaan Retribusi pasar

Menurut Perda Kota Semarang tahun 2004 tentang Retribusi Pasar, Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan dalam lingkungan pasar. Selanjutnya realisasi penerimaan retribusi pasar diperoleh pada suatu periode tahun 2002-2010, dengan satuan ukur rupiah.

2. PDRB perkapita

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Perkapita adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dan sekaligus diperlukan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi regional.

PDRB perkapita yang digunakan dalam variabel ini adalah PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000. Variabel diukur dengan satuan ukur rupiah.

3. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau secara hukum berhak tinggal di Indonesia. Variabel akan diukur dari tahun 2002-2010

4. Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi adalah suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Selanjutnya laju inflasi adalah proses perubahan dari inflasi dalam periode waktu tertentu. Variabel ini akan diukur dalam satuan persentase.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mengukur pengaruh PDRB perkapita, jumlah penduduk dan laju inflasi terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999:147) dalam Hadryan Putra (2010). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *times series* dari tahun 2002-2010.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data sekunder yang digunakan adalah:

1. Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang diperoleh dari Dinas Pasar Kota. Data yang digunakan adalah data per-triwulan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010.
2. Data PDRB perkapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2002-2010 yang kemudian diinterpolasi menjadi data triwulanan. Adapun cara untuk melakukan interpolasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= \frac{1}{4} \left\{ Q_t - \frac{4,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \\
 Q_2 &= \frac{1}{4} \left\{ Q_t - \frac{1,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \\
 Q_3 &= \frac{1}{4} \left\{ Q_t - \frac{1,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \\
 Q_4 &= \frac{1}{4} \left\{ Q_t - \frac{4,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \dots\dots\dots(3.1)
 \end{aligned}$$

Dimana Q_1 , Q_2 , Q_3 , dan Q_4 adalah data triwulan, dan Q_t adalah data tertentu pada tahun t .

3. Data Jumlah Penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2002-2010 yang kemudian diinterpolasi menjadi data triwulanan. Adapun cara untuk melakukan interpolasi adalah sebagai berikut:

$$P_t = P_o (1+r)^t \dots\dots\dots(3.2)$$

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jumlah tahun antara tahun dasar dengan tahun t

r = laju pertumbuhan penduduk per tahun

4. Data Laju Inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data per-triwulan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Studi Pustaka merupakan teknik analisis untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan laporan-laporan terseleksi yang relevan dengan topik penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif statistik serta regresi linier berganda.

3.4.1 Pendeteksian Asumsi Model Klasik

3.4.1.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali:2009).

Ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov (KS). Uji KS dilakukan dengan hipotesis:

HO : Residual terdistribusi normal

HA : Residual tidak terdistribusi normal

3.4.1.2 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Imam Ghozali:2009). Adanya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dideteksi dengan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresikan terhadap variabel independen lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $Tolerance < 0.10$ atau sama dengan $VIF > 10$.

3.4.1.3 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta

akan mengakibatkan hasil uji t dan uji F dapat menjadi tidak berguna (*misleading*).

Untuk mengetahui apakah suatu model terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat dilakukan dengan uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t \dots \dots \dots (3.3)$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

3.4.1.4 Deteksi Autokorelasi

Deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. autokorelasi dapat berbentuk positif maupun negatif. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka estimator OLS tidak lagi efisien, karena selang keyakinan akan semakin melebar. Dalam hal ini, uji t dan uji f tidak lagi menjadi valid dan kurang kuat. Autokorelasi mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan tidak efisien sehingga menjadi tidak dapat dilakukan (Gujarati, 1995-2007).

Pengujian autokorelasi dapat diketahui dengan uji Box Pierce dan Ljung Box yang digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari dua (by default SPSS menguji samapai lag 16). Kriteria ada tidaknya autokorelasi adalah

jika jumlah lag yang signifikan dua atau kurang dari dua, maka dikatakan tidak ada autokorelasi.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan metode pangkat kuadrat kecil biasa (OLS). Inti dari penggunaan metode OLS ini adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Kuncoro, 2001). Adapun model regresi dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i \dots \dots \dots (3.4)$$

Dimana :

Y	= Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
X ₁	= Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita
X ₂	= Jumlah penduduk
X ₃	= Laju inflasi
a	= konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien regresi
e _i	= Gangguan

3.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi *Goodness of fit test* (R²)

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), yang dinotasikan dengan R² merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi D. Nachrowi, 2006).

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). Nilai (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Imam Ghazali, 2005).

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik (Imam Ghazali, 2005).

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk menolak H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2003).

Uji hipotesis terdiri dari pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) dan pengujian koefisien regresi parsial (uji t).

3.4.4.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F diperuntukkan guna melakukan uji apakah variabel-variabel independen secara keseluruhansignifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Apabila nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, secara umum hipotesisnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

H_1 : paling tidak ada satu koefisien regresi yang tidak sama dengan nol.

Dimana k adalah banyaknya variabel.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - k)} \dots\dots\dots(3.5)$$

$$F_{table} = F_{\alpha} (k-1; N-K)$$

dimana:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah data

Pada tingkat signifikansi 10 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a) H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk dan laju inflasi tidak mempengaruhi variabel realisasi penerimaan retribusi pasar.

- b) H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak apabila F hitung $>$ F tabel, yang artinya variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk dan laju inflasi secara bersama-sama dapat atau mempengaruhi variabel realisasi penerimaan retribusi pasar.

3.4.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 > 0$$

Hipotesis alternatif menjelaskan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai positif terhadap penerimaan retribusi pasar.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 > 0$$

Hipotesis alternatif menjelaskan bahwa PDRB perkapita memiliki nilai positif terhadap penerimaan retribusi pasar.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 > 0$$

Hipotesis alternatif menjelaskan bahwa laju inflasi memiliki nilai positif terhadap penerimaan retribusi pasar. Penentuan titik kritis menggunakan *one tail test* terlebih dahulu menentukan tingkat signifikansi (α), *degree of freedom* (df), sehingga nantinya nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{\beta_i}{SE(\beta_i)} \dots\dots\dots (3.6)$$

dimana:

β_i = koefisien regresi yang ditaksir

$SE(\beta_i)$ = standar error regresi yang ditaksir

Menghitung besarnya t-Tabel dengan rumus:

$t\text{-Tabel} = t_{\alpha, n - K}$ dimana, K = banyaknya variabel bebas dan n = jumlah data

Penarikan kesimpulan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk dan laju inflasi berpengaruh terhadap variabel realisasi retribusi penerimaan pasar.
- b) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel realisasi penerimaan retribusi pasar.